**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan memiliki peranan strategis dalam menciptakan sumber daya manusia yang diharapkan sebagai proses menuju cita-cita pembangunan nasional yakni menciptakan anak didik yang cerdas, berkepribadian, beriman, bertakwa dan berketerampilan. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat beradaptasi dan berkompetitif di tengah pergaulan dengan bangsa lainnya.Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional tersebut diperlukan upaya dalam pengembangan potensi peserta didik. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kinerja pendidik atau kinerja guru karena guru merupakan salah satu faktor yang strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan yang meletakkan dasar, serta turut mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 18 mengamanatkan bahwa pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 15, menyatakan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Tujuan tersebut dapat dijabarkan lagi oleh Dikmenjur (2003) menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

Tujuan umum, sebagai bagian dari sistem pendidikan menengah kejuruan SMK bertujuan: (1) menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak, (2) meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik, (3) menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab, (4) menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, dan (5) menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan dan seni. Tujuan khusus, SMK bertujuan: (1) menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, baik secara mandiri atau mengisi lapangan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah, sesuai dengan bidang dan program keahlian yang diminati, (2) membekali peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi dan mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminati, dan (3) membekali peserta didik dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) agar mampu mengembangkan diri sendiri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

SMK memiliki banyak bidang keahlian, salah satunya adalah bidang keahlian Bisnis dan Manajemen. Bidang keahlian terbagi ke dalam program keahlian Akuntansi, Administrasi Perkantoran serta Pemasaran. Untuk dapat menyiapkan lulusan yang terampil, kompeten dan profesional dituntut memiliki guru yang berkompetensi dan memiliki kinerja tinggi.

Menurut Supardi ( 2014: 19) “kinerja guru merupakan kemampuan dan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran”. Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik seorang guru dituntut untuk memiliki kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005). Standar kompetensi guru terdapat dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi yang dimiliki guru tersebut menunjuk pada kinerja guru.

Guru yang memiliki kinerja tinggi akan berusaha meningkatkan kompetensinya agar menjadi guru yang berkualitas. Pencapaian kualitas yang baik dalam sebuah sistem pendidikan bergantung pada 3 hal yaitu pendidik, kurikulum, dan sarana (Kemdikbud, 2013). Ketiga hal tersebut sudah semestinya ditingkatkan secara bersamaan untuk mencapai pendidikan yang bermutu. Guru yang berkualitas perlu didukung kurikulum yang mampu menjawab tantangan zaman. Dalam hal ini, Kurikulum 2013 menjadi kurikulum yang dirancang untuk menjawab tantangan tersebut, dalam rancangannya pun tidak lepas dari tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti diungkapkan Amin Haedari dalam Idi, Abdullah (2014: 25) bahwa “Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi tantangan masa depan”. Maka dari itu, untuk mensukseskan penerapan Kurikulum 2013 guru menjadi faktor yang paling dominan untuk dilaksanakan. Guru dituntut untuk memahami perubahan Kurikulum 2013 sebagai upaya untuk lebih mengembangkan inovasi dan kreativitasnya yang berujung pada peningkatan kinerja.

Upaya untuk meningkatkan kinerja guru dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya melakukan supervisi administrasi dan akademik terhadap guru sebagai bahan perbaikan dan menentukan kebijakan, memberi kesempatan pada guru untuk mengikuti pelatihan akademik, memberi *reward* (penghargaan) pada guru yang berprestasi dan memberi hukuman pada guru yang malas dan bermasalah. Selain itu perlu diadakan pula peningkatan kedisiplinan, pemberian motivasi bahkan pemberian insentif yang layak sehingga memungkinkan guru merasa puas dalam bekerja dan kinerjanya terus meningkat.

Seorang guru sudah seharusnya menyadari bahwa profesinya adalah kunci dalam kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa salah satunya guru wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, guru juga memiliki 30 persen faktor keberhasilan atau kesuksesan siswa maka guru harus meningkatkan kompetensinya agar menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua guru memiliki kinerja yang baik.

Dikutip dari laman website <http://www.info-menarik.net/hasil-ukg-kemendikbud-tahun-2015/>, rata-rata UKG Nasional 53,02 sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional 54,77 sedangkan nilai rata-rata kompetensi pedagogik 48,94. Sementara itu, dikutip dari laman website <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/01/7-provinsi-raih-nilai-terbaik-uji-kompetensi-guru-2015>, sebanyak tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015. Nilai yang diraih tersebut merupakan nilai yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55. Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06).

Uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang yaitu pedagogik dan profesional. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02. Selain tujuh provinsi di atas yang mendapatkan nilai sesuai standar kompetensi minimum (SKM), ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai di atas rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau (54,72), Sumatera Barat (54,68), dan Kalimantan Selatan (53,15).

Menurut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan:

“Jika dirinci lagi untuk hasil UKG untuk kompetensi bidang pedagogik saja, rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM), yaitu 55. Bahkan untuk bidang pedagogik ini, hanya ada satu provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, yaitu DI Yogyakarta (56,91)”. (Kemdikbud, 2016).

Dikutip dari laman website <http://gosulsel.com/2015/11/25/hasil-ukg-kapasitas-guru-di-makassar-rendah/>, sekitar 12.683 guru di Makassar mengikuti kompetensi ini. Mereka terdiri dari tingakt TK 1.426 guru, SD 5.183 guru, SMP 2.643 guru, SMA 1.724 guru, SMK 1.226 guru, 171 pengawas, dan guru sekolah luar biasa (SLB) 310.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Aryati Puspasari Abady mengatakan:

“Kapasitas guru di Makassar dinilai masih rendah, nilai standar pada UKG tahun ini, yakni 55. Sementara, perolehan UKG guru di Makassar rerata 30, 40, dan 50. Hanya sedikit guru-guru kami di Makassar yang melampaui standar”.

Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kinerja guru khususnya di Makassar belum bisa dikatakan baik. Uji Kompetensi Guru (UKG) merupakan ujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik di dalam ranah kognitif, sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan bagian dari penilaian kinerja guru. Uji Kompetensi Guru (UKG) ditujukan bagi guru yang telah memiliki sertifikat profesional, namun hasil yang diperoleh masih jauh di bawah standar minimal. Seperti yang kita ketahui bahwa sertifikat profesional diberikan kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik ataupun kompetensi yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun ternyata fakta yang terjadi belum sesuai dengan harapan dan rencana pemerintah.

Hal ini sejalan dengan keadaan yang terjadi di SMK Negeri 1,4,6, dan 7 Makassar menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pencapaian kinerja guru yang maksimal khususnya guru Akuntansi. Hal ini dapat dilihat seperti guru mengajar secara monoton, tanpa persiapan dan kurang memperhatikan pergantian kurikulum. Kurikulum yang diterapkan oleh sekolah belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian guru. Dilihat dari kinerjanya, berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa guru bahwa sering terjadinya keterlambatan pengerjaan tugas, salah satunya pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang tidak tepat waktu dilihat pada waktu pengerjaannya bahkan dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) guru terkesan asal-asalan. Guru kurang konsisten dalam implementasi skenario RPP yang telah dipersiapkan terutama dalam hal langkah-langkah pelaksanaan dan metode pembelajaran. Hal ini berarti mereka melalaikan tugas dan tanggung jawab yang diterapkan oleh sekolah.

Masalah lain yaitu belum semua guru memiliki motivasi yang optimal sesuai dengan tuntutan mengajar. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan belum semua guru bertanggung jawab dalam bekerja seperti kedisiplinan dalam bekerja, masih terdapat beberapa guru terlambat dalam memasuki kelas saat mengajar dan belum sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selain itu, motivasi guru yang belum optimal juga dapat dilihat dari kurangnya motivasi guru dalam menggali metode mengajar, serta kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan buku teks dan media-media konvensional dalam penyampaian materi pembelajaran. Motivasi guru dalam upaya pengembangan potensi diri masih kurang optimal.

Berdasarkan teori kinerja yang dikemukakan oleh Gibson dan dikutip oleh Supardi (2014:19) menyatakan bahwa:

“Untuk mencapai kinerja yang baik ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kinerja yaitu: Pertama variabel individu, kedua variabel organisasi dan ketiga variabel psikologis individu. Variabel individu meliputi: kemampuan dan keterampilan: mental fisik (dalam hal ini kemampuan dan keterampilan dalam memahami kurikulum), latar belakang (keluarga, tingkat sosial, pengalaman), dan demografis (umur, etnis, jenis kelamin). Variabel organisasi meliputi: sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan. Variabel psikologis individu meliputi: persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi, kepuasan kerja dan iklim kerja”.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah kemampuan dan keterampilan mengajar guru. Dalam penelitian ini, kemampuan dan keterampilan mengajar guru diwujudkan dalam bentuk pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013. Pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013 mempengaruhi kinerja guru, guru dituntut memiliki pemahaman serta kemampuan menjabarkan, mengembangkan dan mengimplementasikan Kurikulum 2013.

Menurut Supardi (2014: 12) mendefinisikan pemahaman kurikulum sebagai berikut:

“Pemahaman Kurikulum adalah kemampuan membedakan, memperluas, menerangkan, menyimpulkan, memberi contoh, mengklasifikasikan konsep-konsep kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan”.

Apabila guru memahami Kurikulum 2013 dengan baik maka seharusnya kinerja guru juga baik.Faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru adalah motivasi kerja. Menurut Uno, Hamzah B (2015:71) mengemukakan bahwa:

“Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja seseorang. Motivasi kerja guru tidak lain suatu proses yang dilakukan untuk menggerakkan guru agar perilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Motivasi kerja yang tinggi akan mendorong guru untuk lebih giat bekerja sehingga hasil yang diperoleh pun menjadi lebih baik.

Beberapa penelitian lain yang mendukung pengaruh pemahaman Kurikulum 2013 dan motivasi kerja terhadap kinerja guru Akuntansi adalah sebagai berikut:

Sri Arum Lestari dan Heryanto Nur Muhammad (2014. Vol.2 No. 3) dalam jurnal yang berjudul Survei Pemahaman Guru terhadap Pelaksanaan Kurikulum 2013 Bidang Studi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan di SMA Negeri Se-Kecamatan Lamongan. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah: tingkat pemahaman guru terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013 pada bidang studi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dalam kategori tinggi.

Ibrahim Hakki (2011. Vol.4 No. 2) dalam jurnal Internasional yang berjudul *Curriculum Reform and Teacher Autonomy in Turkey: The Case Of the History Teaching*. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah: reformasi kurikulum di Turkey memberikan otonomi kepada guru yang dapat mendorong mereka untuk mengambil peran yang lebih besar dalam perencanaan kurikulum dan mengimplementasikannya.

Laeli Mafudah (2015) yang mengkaji Pengaruh Pemahaman Kurikulum, Motivasi Kerja dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kabupaten Semarang, memperoleh hasil bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman kurikulum, motivasi kerja dan kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru.

Oky Estiana Putri (2015), yang mengkaji mengenai Pengaruh Pemahaman Kurikulum, Supervisi Akademik, dan Fasilitas Kerja terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA/MA Negeri di Kota Magelang, memperoleh hasil bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman kurikulum, supervisi akademik, dan fasilitas kerja terhadap kinerja guru.

Berdasarkan permasalahan serta hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ***“Pengaruh Pemahaman Kurikulum 2013 dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Akuntansi di SMK Negeri Kota Makassar”*.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Pemahaman Kurikulum 2013 dan Motivasi Kerja secara parsial terhadap Kinerja Guru Akuntansi di SMK Negeri Kota Makassar?
2. Bagaimanakah pengaruh Pemahaman Kurikulum 2013 dan Motivasi Kerja secara simultan terhadap Kinerja Guru Akuntansi di SMK Negeri Kota Makassar?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Kurikulum 2013 dan Motivasi Kerja secara parsial terhadap Kinerja Guru Akuntansi di SMK Negeri Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Kurikulum 2013 dan Motivasi Kerja secara simultan terhadap Kinerja Guru Akuntansi di SMK Negeri Kota Makassar.
3. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat teoritis dapat dijadikan referensi dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang dunia pendidikan. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya serta dapat memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis pada masa-masa yang akan datang.

1. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan bagi peneliti

Hasil penelitian ini juga dapat memperluas dan menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat mengaplikasikannya dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai guru dengan kinerja maksimal di masa mendatang.

1. Kegunaan bagi guru mata pelajaran Akuntansi

Dapat menjadi bahan instropeksi diri dan sebagai sarana untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu dalam rangka memperbaiki kualitas kinerjanya dalam pembelajaran Akuntansi.

1. Kegunaan bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih baik dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran khususnya SMK Negeri di Kota Makassar.